

ABSTRAK

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia sudah diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, dimana bakal calon sebagaimana yang dimaksud pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 (tiga puluh persen) dengan adanya peraturan tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif pemerintah berfikir guna mendorong eksistensi perempuan di dunia politik dengan Pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam politik khususnya di daerah. Dengan mengetahui metode apa yang di gunakan oleh KPU Kabupaten Bangkalan dalam memenuhi ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta Bagaimana tingkat ketercapaian persentase perempuan dalam mengisi keterwakilannya pada pemilihan umum di Kabupaten Bangkalan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, jenis penelitian yang di gunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

zipper sistem, sistem ini diberlakukan pada pemilihan umum tahun 2024 sistem ini digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yang telah diatur pada pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dengan diberlakukannya zipper sistem di klaim sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.dan berdasarkan presentase keterwakilan perempuan memang sudah memenuhi namun bertentangan dengan putusan MA PKPU Nomor 10/2023 pasal 8 ayat (2) di lakukan pengujian Ke Mahkamah Agung (MA) yang intinya PKPU tersebut di batalkan oleh MA dan KPU diperintahkan kembali untuk menggunakan desimal ke atas. Sehingga berdasarkan hal tersebut KPU kabupaten bangkalan tidak mengindahkan putusan MA yang sudah membatalkan PKPU Pasal 8 ayat (2) 10/23.

kata kunci : keterwakian perempuan, metode,persentase

ABSTRACT

The involvement of women in politics in Indonesia has been regulated by Law Number 7 of 2017 concerning general elections, where the candidates as referred to in article 245 contain women's representation of at least 30 (thirty percent) with the existence of regulations on women's representation in the legislature, the government thinks to encourage the existence of women in politics by fulfilling 30% of women's representation in politics, especially in the regions. By knowing what methods are used by the Bangkalan Regency KPU in fulfilling the provisions of Article 245 of Law Number 7 of 2017, and how the percentage of women's achievement in filling their representation in the general election in Bangkalan Regency.

The method used in this research is qualitative research, the type of research used is empirical juridical using a legal sociology approach.

zipper system, This system was enacted in the 2024 general election. this system is used to increase women's representation which has been regulated in article 245 of Law Number 7 of 2017. With the enactment of the zipper system, it is claimed that it is one of the government's efforts to fulfill women's representation of at least 30%. And based on the percentage of women's representation, it has indeed been fulfilled but contrary to the Supreme Court's decision PKPU Number 10/2023 article 8 paragraph (2) is tested to the Court.

keywords : women's representation, method, percentage